

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Usaha mikro termasuk dalam bagian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Terbukti di saat krisis ekonomi melanda Indonesia, pemerintah sangat mengandalkan peran UMKM untuk memperkecil dampak negatif dari krisis ekonomi. Ketika krisis ekonomi terjadi banyak sektor yang mengalami pertumbuhan pada *output* yang menurun. Setidaknya ada dua faktor yang memainkan peran sangat penting pada saat itu untuk mengurangi efek-efek negatif terhadap kemiskinan. Pertama, pertumbuhan dari kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor informal banyak menyerap tenaga kerja yang diberhentikan akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari sektor formal dan ternyata memberikan sumber pendapatan tambahan bagi tenaga kerja terbesar dibandingkan UB. Kedua, UMKM juga penting sebagai salah satu sumber penciptaan PDB (Tambunan, 2009:59)

UMKM merupakan kelompok usaha yang beroperasi di sektor informal dan padat karya sehingga dinilai mempunyai peran strategis sebagai sumber pencipta lapangan kerja. Peristiwa krisis ekonomi ditahun 1997-1998 berdampak pada besarnya jumlah pekerja formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat dari banyaknya perusahaan-perusahaan besar di sektor formal yang mengalami kebangkrutan. Akibat belum adanya sistem jaminan sosial yang baik terutama sistem pemberi tunjangan

pengangguran yang ada di negara ini, maka banyak dari mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan menganggur. Sehingga menjadi suatu keharusan bagi mereka yang menganggur untuk bekerja di sektor informal maupun membuka usaha sendiri di sektor informal (Setiawan, 2011:78).

Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan, jumlah UKM yang ada di Indonesia hingga saat ini mencapai 56,5 juta unit dan setidaknya UMKM berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen. Sehingga jika keberadaan UMKM terus dikembangkan maka jumlah tenaga kerja yang diserap semakin banyak dan hal ini dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Dalam upaya mengatasi permasalahan UMKM dalam hal modal kerja, maka pemerintah meluncurkan program pembiayaan bagi UMKM dan koperasi. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang diikuti dengan nota kesepakatan bersama antara departemen teknis, perbankan, dan perusahaan penjamin kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dirasa cukup menunjukkan keberpihakan pemerintah pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah baik menyangkut peningkatan sumber daya manusia, permodalan, maupun akses pasar. Untuk lebih mendukung perkembangan UMKM di Indonesia, maka pada tanggal 5 november 2007,

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan pola penjaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah, namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Dengan adanya program KUR diharapkan UMKM memiliki semangat untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang pesat. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 2010 menyatakan untuk membantu UMKM mendapatkan bantuan modal adalah dengan cara memperluas penyaluran KUR sehingga pada tahun 2010 perluasan KUR di tingkat Pemerintah Daerah dengan menambah bank pelaksana KUR dalam hal ini yang ditunjuk adalah 13 Bank Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Jawa Timur merupakan wilayah yang perekonomiannya juga banyak ditopang oleh UKM. Jumlah UKM di Jawa Timur, berdasarkan *survey* yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jatim hingga akhir 2012, jumlah di wilayah Jawa Timur saat ini mencapai 4,2 juta UMKM, dimana 85,09% merupakan usaha mikro, 14,19% merupakan usaha kecil, 0,57% usaha menengah dan hanya 0,15% berupa usaha skala besar.

Untuk menggiatkan upaya pengembangan UMKM, pemerintah telah memberikan penilaian kepada beberapa Kota/Kabupaten yang berkomitmen tinggi dalam mengembangkan UMKM melalui pendekatan finansial dan non finansial di wilayahnya. Pada tahun 2013, kabupaten Jombang mendapatkan penghargaan terbaik dan mendapatkan Paramadhana Utama Adi Nugraha Koperasi. Penilaian itu meliputi unsur menciptakan iklim kondusif, penyediaan sumber daya, proses administrasi pengesahan badan hukum koperasi, perizinan usaha dan dorongan peningkatan jaringan kerja sama. Beberapa kabupaten yang ditetapkan sebagai penggerak koperasi dan UMKM terbaik tahun ini selain kabupaten Jombang di urutan pertama, juga ada Pekalongan, Bangkalan, Jepara, Pasuruan, Mojokerto dll. Penghargaan yang diterima oleh kabupaten Jombang merupakan sebuah perjuangan, konsistensi, iklim yang kondusif dan adanya sinergi antara Pemerintah Kota Jombang dengan pelaku usaha yang ada di kota Jombang. Dengan berkembangnya UMKM di kabupaten jombang maka diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta menekan angka pengangguran di kabupaten Jombang, hal tersebut merupakan program Pemerintah untuk mendukung UMKM secara non finansial.

Sedangkan secara Finansial, melihat banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Jombang yaitu 29.093 ribu UMKM dengan jumlah tenaga kerja sebesar 188.380 ribu (sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2016) dan berbagai macam produk yang selalu berinovasi misalnya manik-manik, batik tulis, batik printing, kerajinan dari perak dll. Maka Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya mengembangkan dan menambah jumlah UMKM dengan

cara memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah salah satunya adalah Bank BRI yang mengutamakan pelayanan terhadap UMKM di dalam misinya.

Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan. beberapa peneliti mencoba mengungkapkan hal ini dalam berbagai perspektif yang berbeda dan menggunakan proksi-proksi tertentu yang akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dalam penelitian ini menggunakan proksi kinerja UMKM yang diproksikan dengan jumlah produksi dan Keuntungan.

Pada penelitian sebelumnya yaitu Made Ary Mayuni dan Surya Dewi Rustariyuni (2015), berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode uji beda wilcoxon menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan dampak positif terhadap jumlah produksi UMKM.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Dian Probo Sakti (2014), Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah produksi dan keuntungan tetapi untuk indikator peningkatan pada jumlah produksi dan keuntungan secara berkala cenderung lebih besar sebelum mengikuti KUR dikarenakan penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mereplikasi penelitian sebelumnya dengan mengambil judul **“PENGARUH KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN JOMBANG”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, Rumusan Masalah dalam penelitian ini “Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berpengaruh Terhadap Kinerja UMKM?”

1.3 BATASAN MASALAH

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti membatasi obyek penelitian yakni kinerja UMKM yang diprosikan dengan jumlah produksi dan keuntungan. Obyek Penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara 1 sampai dengan 25 juta sebagai permodalan pada BRI cabang Jombang tahun periode 2015/2016 .

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Kontribusi Teoritis

1. Sebagai pengaplikasian secara teori untuk kebijakan yang *real* dalam bidang usaha UMKM;
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam membantu meningkatkan kinerja UMKM.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Untuk memberikan kontribusi kepada pelaku usaha UMKM dalam menggunakan kredit yang diperoleh untuk memperbaiki kinerja usaha UMKM yang dimilikinya;
2. Bagi peneliti lain dan pihak – pihak yang memerlukan, dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi yang juga dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.